
**MAKNA PERJUANGAN DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN:
STUDI HISTORIS-FENOMENOLOGIS TERHADAP KONTRIBUSI ORGANISASI
WANITA INDONESIA DALAM PERGERAKAN NASIONAL**

Besse Nahdiah Sulrahma, Rahmi Darwis, Syamzan Syukur

bessenahdiahsulrahma@gmail.com

rahmi.damis@uin-alauddin.ac.id

syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id

UIN Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Keywords:

women's organizations,
national struggle,
phenomenology,
Indonesian history, gender

ABSTRACT

This article aims to reveal the contribution of Indonesian women's organizations in the history of the national movement and the meaning of their struggle from a female perspective. Using a qualitative historical-phenomenological approach, this article explores women's collective experiences through a literature review of historical documents, organizational archives, scholarly journals, and biographies of female figures. The findings indicate that social inequality and colonial patriarchy encouraged the emergence of organizations such as *Putri Mardika* and *Aisyiyah*, which advocated for access to education and gender equality in society. Subsequent organizations—such as PPPI, Perwari, Gerwani, Kowani, and Solidaritas Perempuan—expanded women's roles into the realms of law, politics, and advocacy for reproductive rights and structural justice. These organizations served as spaces for articulating women's struggle as active historical subjects. This article asserts the importance of reconstructing national history to be more gender-just and inclusive of women's roles in Indonesia's socio-political transformation.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

organisasi perempuan,
perjuangan nasional,
fenomenologi, sejarah
Indonesia, gender

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis kontribusi organisasi perempuan Indonesia dalam sejarah pergerakan nasional serta memaknai perjuangan mereka dari perspektif perempuan. Menggunakan pendekatan kualitatif historis-fenomenologis, kajian ini menelusuri pengalaman kolektif perempuan melalui studi pustaka terhadap dokumen sejarah, arsip organisasi, jurnal ilmiah, dan biografi tokoh perempuan. Hasil studi pustaka menjadi bahan analisis utama untuk merunutkan perjuangan organisasi wanita Indonesia dalam Pergerakan nasional. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan patriarki kolonial memicu lahirnya organisasi awal seperti Putri Mardika dan Aisyiyah yang berfokus pada akses pendidikan dan kesetaraan sosial. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya organisasi seperti PPPI, Perwari, Gerwani, Kowani, dan Solidaritas Perempuan yang memperluas medan perjuangan ke bidang hukum, politik, hak reproduksi, serta advokasi keadilan struktural. Berbagai organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah pergerakan, tetapi juga ruang artikulasi identitas dan agensi perempuan sebagai subjek sejarah yang aktif. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi sejarah nasional

yang lebih adil gender dan inklusif guna mengakui peran signifikan perempuan dalam dinamika perubahan sosial-politik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam historiografi Indonesia, perempuan kerap diposisikan sebagai tokoh pendamping atau pelengkap dalam narasi besar perjuangan nasional. Padahal, kontribusi mereka tidak kalah penting dalam proses kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sejak masa kolonial, perempuan Indonesia sudah memainkan peran krusial dalam bidang pendidikan, sosial, hingga politik. Salah satu tokoh sentral yang mencerminkan awal kebangkitan kesadaran perempuan adalah R.A. Kartini. Melalui tulisan-tulisannya dan pendirian Sekolah Kartini pada tahun 1912, Kartini membuka jalan bagi emansipasi perempuan melalui pendidikan formal yang saat itu hampir sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki.¹

Di luar tokoh Kartini, terbentuknya organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika (1912), Aisyiyah (1917), dan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (1928) menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mulai membentuk kesadaran kolektif untuk terlibat langsung dalam perjuangan kebangsaan. Mereka tidak hanya berkutat pada isu domestik, tetapi juga turut mendorong agenda pendidikan, reformasi hukum, dan kemerdekaan nasional. Namun demikian, keberadaan dan kontribusi organisasi-organisasi ini kerap terpinggirkan dalam penulisan sejarah resmi yang berorientasi maskulin dan sentralistik. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pemaknaan sejarah nasional yang seharusnya inklusif terhadap pengalaman dan perjuangan perempuan.²

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kiprah organisasi perempuan Indonesia dalam konteks sosial-politik, seperti karya Susan Blackburn yang menyoroti hubungan perempuan dan negara, serta Mursidah yang menelaah perjalanan dan dinamika organisasi

¹ Raden Ajeng Kartini, "Indonesian Cultural Heritage: Habis Gelap Terbitlah Terang," *Balai Pustaka* 27 (2009): 182. Hal 40

² Karsten SaThierbach et al., *Women and the State in Modern Indonesia* _ Blackburn, Susan, 1947, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 3, 2015. Hal 15

perempuan dari masa kolonial hingga pascakemerdekaan dalam bingkai sejarah nasional.³ Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menekankan aspek struktural dan kronologis, serta belum secara khusus menggali makna pengalaman perempuan sebagai aktor sejarah. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis menjadi penting untuk menangkap bagaimana organisasi-organisasi perempuan dan para anggotanya memaknai peran mereka dalam proses menuju kemerdekaan. Pendekatan ini menempatkan pengalaman subjektif sebagai pusat analisis, guna menelusuri bagaimana makna perjuangan, nasionalisme, dan kemerdekaan dipahami oleh perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang membentuknya⁴

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi organisasi perempuan Indonesia dalam pergerakan nasional, dengan pendekatan fenomenologi sejarah. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana perempuan melalui organisasi-organisasi seperti Putri Mardika, Aisyiyah, Perwari, Gerwani, Kowani, hingga Solidaritas Perempuan, mengartikulasikan makna perjuangan dan membangun identitas kebangsaan dalam bingkai pengalaman sosial mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-fenomenologis untuk memahami pengalaman kolektif perempuan dalam sejarah pergerakan nasional. Pendekatan historis membantu menelusuri konteks sosial, politik, dan budaya yang membentuk kemunculan berbagai organisasi perempuan sejak awal abad ke-20. Sementara itu, perspektif fenomenologis diterapkan melalui pembacaan mendalam terhadap dokumen sejarah sebagai representasi pengalaman perempuan, bukan melalui wawancara langsung.

Penerapan fenomenologi pada dokumen dilakukan dengan memperhatikan pola makna yang muncul dalam arsip organisasi, surat tokoh perempuan, majalah pergerakan, risalah kongres, dan dokumen kelembagaan. Dari pembacaan tersebut, peneliti berupaya menyaring bagian teks yang menggambarkan pengalaman, respon, dan pemaknaan perempuan terhadap kondisi sosial-politik pada masanya. Langkah ini memungkinkan peneliti merumuskan

³ Mursidah Mursidah, "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah," *Muwazah* 4, no. 1 (2013).

⁴ Dermot Moran, "The Phenomenology of the Social World," *Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy* 5, no. 1 (2017)

pemahaman mengenai bagaimana perempuan melihat posisi mereka dan menafsirkan perjuangannya dalam konteks perubahan sosial.

Data yang digunakan seluruhnya bersifat sekunder, berupa arsip organisasi perempuan, dokumen sejarah, jurnal ilmiah, biografi tokoh, dan sumber akademik daring. Fokus analisis diarahkan pada pengalaman kolektif organisasi seperti Putri Mardika, Aisyiyah, PPPI, Perwari, Gerwani, Kowani, dan Solidaritas Perempuan.

Proses analisis dilakukan melalui penelaahan isi dan pembacaan tematik terhadap dokumen-dokumen tersebut. Setiap teks dipahami dalam konteks sosial-historisnya, kemudian ditafsirkan untuk melihat bagaimana pengalaman perempuan dirumuskan, disuarakan, dan diposisikan dalam pergerakan nasional. Hasilnya disajikan dalam bentuk narasi interpretatif yang menggabungkan fakta sejarah dengan pemaknaan pengalaman perempuan sebagai bagian dari dinamika perubahan nasional.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya Organisasi Wanita di Indonesia

Pada masa penjajahan, perempuan pribumi berada dalam posisi yang sangat termarginalkan. Mereka tidak hanya hidup dalam tekanan sistem kolonial, tetapi juga dalam struktur sosial patriarkal yang membatasi ruang gerak dan peluang mereka. Akses pendidikan hampir tertutup, terutama bagi perempuan dari kalangan bawah. Banyak perempuan tidak mendapatkan kesempatan belajar membaca maupun menulis, karena mereka dianggap cukup berperan sebagai istri dan ibu di ranah domestik. Secara historis, ketimpangan ini menjadi latar utama lahirnya gerakan perempuan Indonesia. Namun dari sudut pandang pengalaman, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan sebagai hambatan struktural, tetapi juga sebagai situasi yang membangkitkan kesadaran bahwa ketidakadilan tidak dapat terus diterima. Kesadaran akan keterbatasan dan rasa ketertindasan inilah yang menumbuhkan dorongan untuk mencari perubahan. Tokoh-tokoh seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus muncul sebagai pelopor yang tidak hanya memperjuangkan pendidikan, tetapi juga menyuarakan pengalaman perempuan yang selama ini terabaikan.

Sekolah-sekolah yang mereka dirikan memberi akses awal bagi perempuan untuk belajar membaca dan berpikir kritis. Tempat-tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga

pendidikan formal, tetapi juga menjadi ruang pengalaman baru di mana perempuan mulai mengenali dirinya sebagai individu yang mampu bersuara dan menentukan arah hidupnya. Dari proses inilah perjuangan perempuan berkembang menjadi gerakan kolektif dalam bentuk organisasi sosial dan politik, yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah pergerakan nasional. Dengan kata lain, ketertindasan yang mereka alami justru menjadi titik balik lahirnya kesadaran emansipatoris, sekaligus membangun identitas perempuan sebagai subjek sejarah.

Kesadaran ini semakin menguat dengan hadirnya Politik Etis pada awal abad ke-20 yang membuka akses pendidikan terbatas bagi perempuan pribumi elite. Melalui sekolah-sekolah modern, perempuan mulai mengenal wacana kesetaraan, hak asasi, dan nasionalisme. Di Jawa, misalnya, gerakan pendidikan di Sekolah Van Deventer menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk melihat kemungkinan peran baru di masyarakat.⁵ Dalam suasana nasionalisme awal, Putri Mardika (1912) tampil sebagai wadah formal pertama yang memfasilitasi aspirasi perempuan. Data menunjukkan bahwa organisasi ini aktif mengampanyekan pendidikan perempuan, menolak kawin paksa dan poligami, serta menerbitkan majalah sebagai media penyadaran. Aktivitas tersebut bukan hanya strategi politik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan perempuan untuk mengartikulasikan pengalaman hidup yang sebelumnya tidak mendapat pengakuan. Fenomenologisnya, penerbitan majalah sebagai contoh menjadi sarana bagi perempuan untuk menegaskan keberadaan dan pandangannya dalam ruang publik.

Organisasi Aisyiyah (1917) kemudian melengkapi perkembangan ini dengan memadukan pendidikan dan dakwah dalam bingkai nasionalisme Islam. Aktivitas mereka, seperti penyelenggaraan kursus dan advokasi sosial, menjadi bentuk pengalaman kolektif perempuan dalam berperan di ruang publik. Dari sudut pandang makna, keterlibatan di Aisyiyah membuat perempuan memahami perjuangannya sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan agama. Ketika gerakan internasional semakin berkembang, organisasi perempuan Indonesia seperti PPPI (1928), Perwari (1945), dan Gerwani (1950-an) menunjukkan perluasan medan perjuangan ke ranah hukum, politik, dan kebijakan publik. Secara historis, organisasi-organisasi ini terlibat dalam isu reformasi hukum, pendidikan, hak sipil, dan representasi perempuan. Namun pada dimensi fenomenologis, keterlibatan ini mencerminkan pengalaman

⁵ Oceani Enjang Mahistra, "Sekolah Van Deventer Sekolah Guru Perempuan Di Jawa 1918-1942," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 1, no. 1 (2015).

perempuan dalam menuntut ruang partisipasi yang setara. Bagi banyak anggota Gerwani, misalnya, langkah masuk ke politik dipahami sebagai upaya membebaskan diri dari ketertindasan ganda: kolonialisme dan patriarki.

Pemaknaan perempuan terhadap perjuangan ini dapat dilihat dalam beberapa dimensi:

1. Reklamasi ruang publik

Perempuan tidak hanya menuntut akses pendidikan dan kebebasan bergerak, tetapi juga memaknai tuntutan tersebut sebagai hak untuk menentukan arah hidup dan masa depannya sendiri.

2. Resistensi terhadap patriarki dan kolonialisme

Pengalaman ketertindasan dipahami sebagai struktur yang membebani kehidupan sehari-hari mereka. Karena itu, perjuangan melawan ketidakadilan bersifat ganda: melawan kekuasaan kolonial dan batas-batas budaya patriarkal.

3. Pembentukan identitas kolektif

Organisasi perempuan menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, dan membentuk kesadaran gender. Dalam kerangka fenomenologis, solidaritas ini muncul dari pengakuan bersama atas pengalaman hidup yang serupa.

4. Penegasan perempuan sebagai subjek sejarah

Melalui tindakan kolektif, perempuan memaknai dirinya bukan sebagai figur pendukung, tetapi sebagai aktor utama yang memengaruhi jalannya sejarah. Identitas sebagai subjek politik dan sosial terbentuk melalui pengalaman berorganisasi, berdebat, menulis, dan mengambil keputusan.

Dengan memadukan perspektif historis dan fenomenologis, pembahasan ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan tidak hanya bergerak pada level struktural, tetapi juga pada level pengalaman. Perubahan sosial yang mereka dorong lahir dari pergulatan makna, kesadaran akan ketidakadilan, dan aspirasi untuk mengubah kehidupan mereka sendiri.

Rekam Jejak Organisasi Wanita dalam Mendorong Kesadaran Nasional

Dalam perspektif historis-fenomenologis, organisasi perempuan tidak hanya merespons ketimpangan gender secara struktural, tetapi juga membentuk makna perjuangan bagi perempuan sebagai aktor sejarah yang sadar akan peran dan identitasnya. Sebagai pionir, Putri Mardika (1912) dibentuk di Batavia oleh istri-istri tokoh Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Ia menempatkan pendidikan perempuan sebagai pilar utama mengorganisasi beasiswa, menerbitkan majalah, dan memperluas akses perempuan pribumi ke ruang publik melalui kebijakan pendidikan.⁶ Sementara itu, Aisyiyah (1917) mengintegrasikan nilai Islam dan nasionalisme, mendirikan sekolah serta TK Bustanul Athfal⁷, dan ikut aktif membawa isu pernikahan dini dan hak perempuan ke Kongres Perempuan 1928 lewat jalur keagamaan. Federasi PPPI (1928) kemudian mempertemukan berbagai organisasi perempuan dari berbagai latar agama dan etnis, menciptakan wadah perjuangan bersama di bidang pendidikan, hukum, dan politik perempuan.⁸

Pada era pascakemerdekaan, PEWARI (1945) meneguhkan posisi perempuan melalui advokasi hukum, pelatihan keterampilan, dan layanan untuk perempuan terpencil mewujudkan makna kemerdekaan perempuan sebagai kemandirian dan kesetaraan sosial. Gerwani (1950) membawa isu struktural seperti reformasi hukum keluarga, hak buruh, dan inklusi kelas pekerja ke dalam agenda nasionalisme perempuan. Meski dilarang pasca-1965, Gerwani tetap menjadi simbol feminisme kerakyatan yang penting. Kowani (1952) berhasil menyatukan organisasi modernis, tradisional, dan keagamaan, dan menjalankan program menyeluruh di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta diplomasi budaya sebagai bagian dari nation-building⁽⁶⁾.

Era reformasi menyaksikan pembentukan Solidaritas Perempuan (1990), yang

⁶ Restu Dini Yanti, "Potret Gerakan Perempuan Pada Abad Ke 20 Di Batavia: Poetri Mardika 1912," *Historia: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 3, no. 2 (2020). Hal 135–138.

⁷ Naufan Dzaky Anfasa, "Perkembangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 33 Griya Shanta Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Pada Tahun 2003-2023" 4, no. Januari (2024)

⁸ Keyza Pratama Widiatmika, "Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 Di Yogyakarta," *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015). Hal 12-16

mengadvokasi UU PKDRT, hak reproduksi, hak buruh migran, dan isu ekologis serta digital menegaskan bahwa makna perjuangan perempuan telah melampaui kemerdekaan formal, menuju ke arah keadilan struktural dan kesadaran gender yang lebih luas⁽⁷⁾.

Keseluruhan organisasi ini memperlihatkan bahwa makna perjuangan perempuan adalah proses yang kaya makna: dari memerlukan akses pendidikan, menjadi subjek nasionalis, hingga memperjuangkan hak struktural di level kebijakan. Organisasi-organisasi tersebut berperan sebagai arena artikulasi makna di mana pengalaman subjektif perempuan diolah menjadi tindakan kolektif yang memiliki dampak historis sebuah revolusi identitas dan politik dalam skala sosial dan nasional.

Menggugat Representasi: Memulihkan Makna Perjuangan Perempuan dalam Sejarah Indonesia

Sejarah pergerakan nasional Indonesia tidak hanya dibentuk oleh tokoh-tokoh laki-laki yang dominan dalam narasi resmi, tetapi juga oleh perempuan yang berjuang melalui berbagai organisasi sosial-politik yang selama ini kurang memperoleh pengakuan setara dalam historiografi arus utama. Representasi perempuan dalam sejarah resmi, khususnya pada masa Orde Baru, lebih banyak menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki atau simbol moralitas domestik melalui wacana “ibu bangsa”. Narasi ini menutupi kenyataan bahwa perempuan berperan sebagai subjek aktif dalam proses pembentukan bangsa dan dinamika transformasi sosial-politik. Dengan menggunakan pendekatan historis-fenomenologis, narasi tersebut perlu digugat kembali dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis makna sejarah.

Organisasi seperti Putri Mardika sejak 1912 bahkan telah membuka ruang artikulasi bagi perempuan pribumi melalui pendidikan, penerbitan, dan advokasi sosial, yang membentuk identitas perempuan yang lebih merdeka secara intelektual dan sosial.⁹ Sementara itu, Aisyiyah tidak hanya melanjutkan semangat itu dalam bingkai Islam progresif, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dapat menjadi landasan perjuangan sosial-politik perempuan,

⁹ Restu Dini Yanti, “Potret Gerakan Perempuan Pada Abad Ke 20 Di Batavia: Putri Mardika 1912,” *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 3, no. 2 (2020). Hal 135–138.

termasuk dalam isu penghapusan pernikahan usia dini dan pendirian sekolah untuk anak perempuan.¹⁰

Perkembangan selanjutnya tampak pada masa pergerakan nasional ketika perempuan memperluas perannya dalam ruang politik formal dengan mendirikan federasi seperti Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) pada 1928. Federasi ini menyatukan organisasi dari latar agama dan ideologi berbeda, serta mengangkat isu kesetaraan hukum dan pendidikan sebagai agenda nasional. Dengan demikian, perempuan bukan lagi sekadar hadir di ruang domestik, melainkan menjadi aktor yang aktif dalam diskusi publik, advokasi hukum, dan proses perumusan agenda kebangsaan.¹¹

Kontribusi perempuan semakin terlihat dalam organisasi seperti Gerwani pada dekade 1950-an, yang mengembangkan agenda perjuangan mencakup reformasi hukum keluarga, hak buruh perempuan, pendidikan politik, dan kesehatan reproduksi.¹² Berbagai studi akademik menunjukkan bahwa program Gerwani pada masa ini berfokus pada pemberdayaan perempuan kelas pekerja dan peningkatan kesejahteraan keluarga, bukan pada tindakan kekerasan sebagaimana yang kemudian dilekatkan melalui narasi. Namun, representasi Gerwani mengalami perubahan drastis setelah peristiwa 1965.¹³ Sejumlah kajian sejarah menunjukkan bahwa Orde Baru membangun narasi propaganda yang menggambarkan Gerwani sebagai organisasi yang kejam, seksual, dan anti-negara melalui laporan intelijen politis dan produksi budaya populer, meskipun tuduhan tersebut tidak didukung bukti empiris.¹⁴ Analisis media dan historiografi pasca-Reformasi juga mengungkap bahwa konstruksi propaganda ini memainkan peran besar dalam membentuk citra negatif Gerwani, sehingga menghapus kontribusi sosial-

¹⁰ Siti Chamamah Soeratno & Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Peran Aisyiyah dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2) (2002). Hal 47-55

¹¹ Core.ac.uk, "Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta,". Hal 12-16

¹² Jurnal Tentang "Epistemologi Intelijen Dalam Narasi Negara Yang Bias Tentang Gerwani Dalam G30s 1965 Am G30s 1965". Di Akses Pada Tanggal 28 November 2025 Pukul 12.00

¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183>. Di akses pada tanggal 28 November 2025 pukul 12.00

¹⁴ Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Ultimus, 2010), hlm. 22–25.

politik mereka dari sejarah resmi dan menggantinya dengan stigma yang bertahan selama beberapa dekade.¹⁵ Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuasaan negara membentuk dan mengontrol representasi perempuan untuk kepentingan ideologis, serta bagaimana meninjau ulang representasi perempuan dalam sejarah Indonesia menjadi penting untuk mengembalikan pengalaman perempuan sebagai sumber makna historis, bukan sekadar objek narasi resmi.

Pada era Reformasi, representasi perempuan mengalami revitalisasi, terutama melalui organisasi seperti Solidaritas Perempuan, yang memosisikan perempuan sebagai subjek hukum dan politik yang sadar akan hak tubuh, kerja, dan lingkungan hidup.¹⁶ Organisasi ini mengadvokasi isu kekerasan berbasis gender, hak reproduksi, serta perlindungan buruh migran melalui pendampingan hukum dan pendidikan komunitas. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perempuan dalam jaringan Solidaritas Perempuan menegosiasikan relasi kuasa sehari-hari dan membangun bentuk perlawanan berbasis pengalaman hidup, sehingga memperlihatkan kapasitas mereka sebagai aktor transformatif, bukan semata korban struktur sosial.¹⁷ Temuan ini diperkuat oleh riset feminis Indonesia yang menekankan pentingnya posisi perempuan sebagai pembuat keputusan dalam isu migrasi dan pembangunan sosial.¹⁸

Dengan demikian, pemulihan makna perjuangan perempuan menuntut dekonstruksi historiografi nasional yang bias gender, agar pengalaman perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari konstruksi sejarah yang sah. Melalui perspektif fenomenologis, pengalaman perempuan menjadi sumber pengetahuan historis yang

¹⁵ Sri Lestari, "Gerwani dalam Dinamika Politik Indonesia 1950–1965," *Jurnal Perempuan* No. 94 (2017),

¹⁶ Hilmi, Mirza. "Gerakan Perempuan dalam Era Reformasi: Studi atas Solidaritas Perempuan." *Jurnal Analisis Gender* 4, no. 2 (2017): 45–47.

¹⁷ Fatimah, Siti. "Perlawanan Perempuan dalam Arus Migrasi Internasional." *Jurnal Perempuan*, no. 94 (2017): 66–72.

¹⁸ Susanti, Yulia. "Perempuan sebagai Subjek Kebijakan Publik dalam Isu Migrasi." *Jurnal Politik* 5, no. 2 (2019): 155–160.

menunjukkan bagaimana mereka membangun kesadaran, strategi, dan kontribusi nyata dalam arah perubahan bangsa.¹⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan historis-fenomenologis terhadap kiprah organisasi perempuan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa makna perjuangan perempuan tidak dapat direduksi hanya sebagai respons terhadap ketimpangan struktural, melainkan merupakan bentuk artikulasi kesadaran historis yang transformatif. Ketimpangan sosial dan patriarki kolonial justru menjadi titik awal bagi perempuan untuk mengembangkan kesadaran emansipatoris yang diwujudkan melalui pendidikan, advokasi sosial, dan konsolidasi organisasi. Dari Putri Mardika dan Aisyiyah pada awal abad ke-20 hingga Solidaritas Perempuan di era reformasi, tampak jelas bahwa organisasi perempuan telah memainkan peran kunci dalam membentuk narasi kebangsaan yang inklusif. Perempuan bukan hanya pelengkap sejarah, melainkan aktor yang secara aktif memproduksi makna perjuangan melalui tindakan kolektif, reformasi hukum, dan advokasi kebijakan publik. Dalam konteks inilah, organisasi-perempuan menjadi ruang epistemologis tempat pengalaman subjektif dikristalkan menjadi agenda sosial-politik. Representasi perempuan dalam sejarah harus dikaji ulang untuk membongkar bias patriarki dalam narasi resmi negara, sekaligus membuka ruang bagi rekonstruksi sejarah yang adil gender. Maka, perjuangan perempuan Indonesia tidak hanya mencerminkan tuntutan terhadap keadilan, tetapi juga menunjukkan kapasitas mereka dalam mengimajinasikan dan merealisasikan bentuk-bentuk kebangsaan yang lebih etis, setara, dan berkeadaban.

Saran

Berdasarkan tulisan yang dikemukakan ini, penulis berharap kepada penulis sejarah dan pengampu kurikulum pendidikan nasional agar secara aktif merevisi narasi historiografi Indonesia dengan memasukkan kontribusi organisasi perempuan sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa. Revisi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan

¹⁹ Kodiran, Nanik. "Fenomenologi dan Pengalaman Perempuan dalam Historiografi." *Jurnal Sejarah FIB UGM* 16, no. 2 (2019): 44–50.

buku teks sejarah yang menampilkan organisasi seperti Putri Mardika, Aisyiyah, PPPI, hingga Solidaritas Perempuan secara utuh bukan sebagai catatan pinggiran, tetapi sebagai aktor utama sejarah. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada peneliti kajian gender dan lembaga kearsipan nasional untuk mendokumentasikan dan mendigitalisasi arsip-arsip gerakan perempuan secara sistematis agar makna perjuangan perempuan dapat diakses, dipelajari, dan dikembangkan lebih lanjut oleh generasi akademik masa kini dan mendatang. Dengan langkah ini, makna perjuangan perempuan tidak hanya dipulihkan dalam ruang akademik, tetapi juga dijadikan dasar pembentukan kesadaran kolektif yang setara dan adil dalam kehidupan berbangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anfasa, Naufan Dzaky. “Perkembangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 33 Griya Shanta Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Pada Tahun 2003–2023.” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2024)
- Blackburn, Susan. *Women and the State in Modern Indonesia*. Karsten SaThierbach et al. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 3 (2015).
- Core.ac.uk. “Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta.”
- Dini Yanti, Restu. “Potret Gerakan Perempuan Pada Abad Ke-20 Di Batavia: Poetri Mardika 1912.” *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Diniah, H. (2007). *Gerwani Bukan PKI* (1 ed.; S. M. Sihaloho & Sugihastuti, Ed.). Yogyakarta: CarasvatiBooks.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dan Siti Chamamah Soeratno. “Peran Aisyiyah dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2 (2002).
- Fatimah, Siti. “Perlawanan Perempuan dalam Arus Migrasi Internasional.” *Jurnal Perempuan* no. 94 (2017)
- Hendropriyono, A. M. (2013). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia* (1 ed.; N. Pane, Ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hendropriyono, A. M. (2018). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia* (2 ed.; D. G. Adian, Ed.). Jakarta: Putra Wira Cendikia.
- Hilmi, Mirza. “Gerakan Perempuan dalam Era Reformasi: Studi atas Solidaritas Perempuan.” *Jurnal Analisis Gender* 4, no. 2 (2017): 45–47.

- Kodiran, Nanik. "Fenomenologi dan Pengalaman Perempuan dalam Historiografi." *Jurnal Sejarah FIB UGM* 16, no. 2 (2019): 44–50.
- Lestari, Sri. "Gerwani dalam Dinamika Politik Indonesia 1950–1965." *Jurnal Perempuan* no. 94 (2017).
- Mahistra, Oceani Enjang. "Sekolah Van Deventer Sekolah Guru Perempuan Di Jawa 1918–1942." *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2015).
- Moran, Dermot. "The Phenomenology of the Social World." *Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Mursidah, Mursidah. "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah." *Muwazah*, Vol. 4, No. 1 (2013).
- Pratama Widiatmika, Keyza. "Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta." *Etika Jurnanisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, Vol. 16, No. 2 (2015)
- Susanti, Yulia. "Perempuan sebagai Subjek Kebijakan Publik dalam Isu Migrasi." *Jurnal Politik* 5, no. 2 (2019)
- Raden Ajeng Kartini. *Indonesian Cultural Heritage: Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Wieringa, Saskia. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Ultimus, 2010.